



INTISARI

Pembangunan kawasan pedesaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diperlukan untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Pemerintah Kabupaten Karanganyar menyadari pentingnya hal tersebut, maka disusunlah rencana pengembangan kawasan pedesaan beras organik, yang terdiri dari delapan program, yang diimplementasikan pada tahun 2017-2021. Namun, belum pernah dilakukan evaluasi program dalam pembangunan kawasan pedesaan secara memadai. Evaluasi diperlukan untuk mengukur hasil pelaksanaan atas rencana dan mendukung pemahaman program sebagai bahan perbaikan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan keberlanjutan program, dan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan program peningkatan sarana produksi pupuk organik dan program pengembangan sarana produksi beras organik di kawasan pedesaan beras organik Kabupaten Karanganyar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif dengan variabel penelitian yang diturunkan berdasarkan tinjauan pustaka dan didukung dokumen perencanaan, terutama rencana pembangunan kawasan pedesaan. Efektivitas program diukur dengan variabel ketercapaian tujuan, tingkat penggunaan, dan penurunan biaya. Keberlanjutan program diukur dengan variabel usaha mempertahankan hasil dan kemampuan keuangan. Unit amatan dalam penelitian ini adalah kelompok tani penerima kegiatan dalam program di desa yang termasuk dalam kawasan pedesaan beras organik Kabupaten Karanganyar tahun 2017-2019.

Hasil penelitian menunjukkan program peningkatan sarana produksi pupuk organik tidak efektif dan tidak berkelanjutan karena lima kegiatan (semua kegiatan) tidak efektif. Program pengembangan sarana produksi beras organik tidak efektif dan tidak berkelanjutan karena hanya satu dari empat kegiatan yang efektif. Faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan program terutama yaitu program dan kegiatan di RPKP belum dilakukan pembahasan dengan entitas sumber pembiayaannya, kekurangjelasan isi program dalam dokumen perencanaan dan kawasan pedesaan di dokumen RTRW Kabupaten, koordinasi dan dukungan finansial dari kementerian, pemerintah daerah, dan pemerintah desa setempat, kondisi dan perencanaan kelompok tani penerima program, permasalahan mekanisme penetapan calon penerima bantuan dan pengendalian distribusi bantuan, serta monitoring dan pendampingan dari pemerintah kabupaten belum memadai.



ABSTRACT

As mandated by Law number 6 of 2014 concerning Village and Law number 27 of 2007 concerning Spatial Planning, rural area development is necessary to accelerate development and community empowerment in rural areas. The Karanganyar Regency Government realizes its importance, hence compiling an organic rice rural area development plan, consisting of eight programs and implemented in 2017-2021. However, they have never conducted a proper program evaluation in the development of rural areas. Evaluation is needed to measure the plans' implementation results and support the program understanding as material for policy improvement. This study aimed to evaluate the program's effectiveness and sustainability, and identify factors that influence the failure of the two researched programs.

This study used a deductive approach with research variables derived from a literature review and supported planning documents, especially the rural area development plan. Program effectiveness was measured using the output achievement, utilization rate, and cost reduction. Program sustainability was measured using the maintenance of results and financial capability. The observation unit in this study is farmer organizations that received the program in the village that are included in organic rice rural area Karanganyar Regency in 2017-2019.

The results showed that the organic fertilizer facilities improvement program was ineffective and not sustainable because five activities (all) were ineffective. The organic rice facilities improvement program was ineffective and not sustainable because only one activity is effective out of four. Factors that affected the program's failure were: the programs listed in the RPKP have not been discussed with the financing entity, the clarity of program content in planning documents and organic rice rural area in RTRW, coordination and financial support from ministries, regional governments, and local village governments, the conditions and planning of farmer organizations receiving the program, problem in the determination of beneficiary candidates, aid distribution management, and inadequate government monitoring and guidance.